

## INTISARI

Studi ini mencoba untuk menganalisis proses implementasi kebijakan *long form audit report* dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung. Implementasi LFAR diharapkan mampu memberikan nilai tambah pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga selain opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, para pemangku kepentingan juga dapat mengetahui mengenai program atau kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer serta data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam serta analisis dokumen.

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi LFAR pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik. Aspek-aspek terkait implementasi seperti keberhasilan komunikasi di dalam implementasi, kejelasan tujuan implementasi LFAR, maupun *attitude* dari para pemeriksa selaku pelaksana implementasi LFAR telah berjalan serta terbukti memiliki pengaruh positif terhadap implementasi LFAR pada BPK perwakilan provinsi Lampung, meskipun ada beberapa yang belum berjalan dengan optimal seperti ketersediaan sumber daya maupun standar pelaksanaan untuk mendukung implementasi LFAR. LHP LFAR BPK provinsi Lampung juga telah memenuhi beberapa unsur-unsur di dalam sebuah *extended audit report* seperti informasi mengenai lingkup audit, serta kejelasan bahasa yang digunakan; informasi tambahan mengenai kualitas sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk temuan yang berindikasi kecurangan atau *fraud* serta informasi tambahan lainnya di luar cakupan laporan keuangan, yaitu kinerja dari program atau kebijakan pemerintah provinsi Lampung. Namun demikian, ada dua aspek laporan yang tidak dimuat di dalam LHP LFAR, baik secara langsung atau tidak, yaitu informasi mengenai tim audit dan tingkat *engagement*nya, serta proses audit yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa.

*Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Long Form Audit Report, Badan Pemeriksa Keuangan, Financial Audit, Performance Audit*

## ABSTRACT

This study attempts to analyze the implementation process of the long form audit report policy in the examination of regional government financial reports, which is carried out by the Audit Board of the Republic of Indonesia Representative for Lampung Province. LFAR implementation is expected to be able to provide added value to reports on audit results of local government financial reports so that in addition to opinions on the fairness of the presentation of financial reports, stakeholders can also find out about programs or policies that are being or have been implemented by local governments.

The method used in this research is a qualitative method using two types of data, namely primary data and secondary data. Data collection uses in-depth interview techniques and document analysis.

Research shows that the implementation of LFAR at the Representative BPK of Lampung Province has gone well. Aspects related to implementation such as successful communication during implementation, clarity of LFAR implementation objectives, as well as the attitude of examiners as executors of LFAR implementation have been running and proven to have a positive influence on LFAR implementation at the BPK representative for Lampung province, although there are some that have not run optimally. such as the availability of resources and implementation standards to support LFAR implementation. LHP LFAR BPK Lampung province has also fulfilled several elements in an extended audit report such as information regarding the scope of the audit, as well as the clarity of the language used; additional information regarding the quality of the internal control system and compliance with laws and regulations including findings indicating fraud or fraud as well as other additional information outside the scope of financial reports, namely the performance of programs or policies of the Lampung provincial government. However, there are two aspects of the report that are not included in the LHP LFAR, either directly or indirectly, namely information about the audit team and their level of engagement, as well as the audit process carried out by the examining team.

*Keywords: Implementasi Kebijakan, Long Form Audit Report, Badan Pemeriksa Keuangan, Financial Audit, Performance Audit*